

Humas Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Government Public Relations (GPR) selalu membangun komunikasi organisasi yang konstruktif. Adaptasi terhadap perubahan menjadi kunci bagaimana GPR membangun komunikasi organisasi yang positif di tengah pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang beragam terhadap layanan yang diberikan organisasi pemerintahan. Untuk membangun komunikasi tersebut, GPR tentu harus menyiapkan strategi komunikasi organisasi yang tepat. Penelitian dan publikasi menjadi bagian dari proses penentuan bagaimana strategi komunikasi organisasi tersebut dibangun. Dan dalam pelaksanaannya, GPR bisa mengimplementasikan jenis publikasi apa yang sesuai dengan konteks permasalahan, karakteristik pemangku kepentingan, maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat itu.

Menyesuaikan jenis publikasi, GPR tentunya juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Sehingga publikasi yang diterapkan bisa diproses secara cepat dan tepat. Tidak hanya itu, fleksibilitas penggunaan ruang (space) kerja yang diharapkan bisa membangun budaya kerja yang sehat juga menjadi ukuran bagaimana GPR membangun sebuah strategi komunikasi organisasi yang diharapkan bisa memberikan dorongan bagi pemangku kepentingan internal organisasi untuk berinteraksi secara optimal. Suasana kerja yang terbangun secara nyaman itulah yang menjadi penentu bagaimana perubahan lingkungan kerja bisa dipengaruhi oleh interior kerja yang ada.

Melalui buku ini, penulis ingin membagikan perspektif penulis terhadap peran GPR dalam strateginya membangun komunikasi organisasi melalui perannya pada penelitian dan publikasi. Strategi komunikasi organisasi juga dibangun GPR melalui budaya kerja dan manajemen interior kerja yang kondusif. Penulis berharap buku ini bisa memperkaya referensi yang ada terkait bidang kehumasan di lingkungan pemerintahan. Lebih lanjut, penulis berharap bisa mendapatkan masukan, saran, maupun kritik dari para pembaca. Terima kasih.

## GPR Dalam Penelitian, Publikasi, & Peran Strategisnya

# GPR

Dalam Penelitian, Publikasi, & Peran Strategisnya



**GPR DALAM PENELITIAN,  
PUBLIKASI, & PERAN  
STRATEGISNYA**

*GPR Dalam Penelitian, Publikasi, & Peran Strategisnya*

# **GPR DALAM PENELITIAN, PUBLIKASI, & PERAN STRATEGISNYA**

**Rostamaji Kornawan**



# **GPR dalam Penelitian, Publikasi, dan Peran Strategisnya**

***Penulis:***

Rostamaji Korniwawan

***ISBN:***

978-623-6992-05-0

***Desain Sampul:***

Awang dirgantara putra

***Tata Letak:***

Tim the Journal Publishing

vii+184 Hlm; 15,5 Cm X 23 Cm.

Cetakan I, Januari 2021

***Penerbit:***

**THE JOURNAL PUBLISHING**

Jl. Patukan Gamping Tengah RT.004 RW. 015, Ambarketawang,  
Gamping Tengah, Sleman, DIY. Cp. 0823-2679-6566

-----  
*Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang*

*Dilarang Memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara  
apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

# Kata Pengantar

**Humas** Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Government Public Relations* (GPR) selalu membangun komunikasi organisasi yang konstruktif. Adaptasi terhadap perubahan menjadi kunci bagaimana GPR membangun komunikasi organisasi yang positif di tengah pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang beragam terhadap layanan yang diberikan organisasi pemerintahan.

Untuk membangun komunikasi tersebut, GPR tentu harus menyiapkan strategi komunikasi organisasi yang tepat. Penelitian dan publikasi menjadi bagian dari proses penentuan bagaimana strategi komunikasi organisasi tersebut dibangun. Dan dalam pelaksanaannya, GPR bisa mengimplementasikan jenis publikasi apa yang sesuai dengan konteks permasalahan, karakteristik pemangku kepentingan, maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat itu.

Menyesuaikan jenis publikasi, GPR tentunya juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Sehingga publikasi yang diterapkan bisa diproses secara cepat dan tepat. Tidak hanya itu, fleksibilitas penggunaan ruang (*space*) kerja yang diharapkan bisa membangun budaya kerja yang sehat juga menjadi ukuran bagaimana GPR membangun sebuah strategi komunikasi organisasi yang diharapkan bisa memberikan dorongan bagi pemangku kepentingan internal organisasi untuk berinteraksi secara optimal. Suasana kerja yang terbangun secara nyaman itulah yang menjadi penentu bagaimana perubahan lingkungan kerja bisa dipengaruhi oleh interior kerja yang ada.

## ***GPR Dalam Penelitian, Publikasi, & Peran Strategisnya***

Melalui buku ini, penulis ingin membagikan perspektif penulis terhadap peran GPR dalam strateginya membangun komunikasi organisasi melalui perannya pada penelitian dan publikasi. Strategi komunikasi organisasi juga dibangun GPR melalui budaya kerja dan manajemen interior kerja yang kondusif. Penulis berharap buku ini bisa memperkaya referensi yang ada terkait bidang kehumasan di lingkungan pemerintahan. Lebih lanjut, penulis berharap bisa mendapatkan masukan, saran, maupun kritik dari para pembaca. Terima kasih.

Jakarta, November 2020

Rostamaji Kornawan

# Daftar Isi

GPR dalam Penelitian, Publikasi, dan Peran Strategisnya ..	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab 2 Portal Multibahasa: Komparasi Pendekatan Budaya Pemerintah Busan Kota Metropolitan dan Pemerintah Indonesia.....	8
Bab 3 Endorser Layanan Iklan Masyarakat Kementerian Keuangan: Analisis Netnografi Platform YouTube....	45
Bab 4 Digitalisasi Tulisan Sebagai Bentuk Transisi Peran Publikasi Humas Pemerintah.....	105
Bab 5 Humas Pemerintah Membangun Komunikasi Organisasi Eco-Friendly Office .....	132
Bab 6 Layanan Humas Pemerintah dan Pranata Humas Dalam Organisasi .....	157
Bab 7 Penutup.....	179
Autobiografi .....	184

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

**Peran** Humas di lingkungan pemerintah sangat membantu kelancaran seluruh tugas pemerintahan, karena tugas mereka di bidang komunikasi publik dapat membangun perspektif positif masyarakat. Mereka selalu siap mengidentifikasi isu yang selalu berkembang, menempatkan strategi komunikasi yang tepat, mengevaluasi dampak komunikasi publik yang dilakukan pemerintah, dan membangun kembali kepercayaan publik melalui proses pengendalian risiko komunikasi yang telah mereka capai.

Menjaga kepercayaan pemangku kepentingan menjadi sasaran utama yang harus dilakukan Humas Pemerintah agar kebijakan dan program kegiatan yang dilakukan pemerintah memberikan hasil yang optimal bagi perubahan lingkungan organisasi pemerintah maupun lingkungan masyarakat disekitarnya. Sikap profesional Humas Pemerintah merupakan nilai kerja yang selalu digunakan Humas Pemerintah ketika mereka menjalankan tugas mereka sehari-hari. Termasuk, nilai integritas yang juga mereka gunakan untuk menyatukan tujuan organisasi dengan kepentingan Humas Pemerintah di dalam membangun kompetensi yang mereka miliki.

Buku kajian kehumasan ini dapat memberikan gambaran luas mengenai peran dan fungsi Humas Pemerintah bagi organisasi maupun masyarakat luas. Mereka memiliki tanggung jawab yang cukup signifikan di dalam mendorong bentuk reformasi organisasi yang tepat maupun perubahan perilaku sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Komunikasi publik menjadi tugas utama Humas Pemerintah dengan didukung alat dan cara komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan Humas Pemerintah ketika mereka memproses penyelesaian persoalan yang tengah terjadi.

Humas Pemerintah hampir selalu dipastikan menggunakan ruang publikasi sebagai bentuk penyampaian informasi kebijakan pemerintah. Ruang publikasi pun mulai

meliputi tiga tingkatan. Saat ini, pemerintah mengusulkan satu tingkatan lagi untuk jenjang jabatan fungsional Pranata Humas Ahli, sehingga menjadi empat tingkatan. Usulan penambahan jabatan tersebut adalah Pranata Humas Ahli Utama.

Peran dan tanggung jawab Pranata Humas Ahli Utama tentu semakin memberikan banyak tantangan bagi insan kehumasan di lingkungan pemerintah. Untuk membangun Humas Pemerintah yang berkualitas, Pranata Humas Ahli Utama berperan tidak hanya sebagai pembina, tetapi jenjang ini juga berperan sebagai agen komunikator yang berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan pemerintah secara luas. Khususnya, peran di dalam membangun komunikasi internasional. Dengan demikian, tanggung jawab Pranata Humas Ahli Utama juga semakin berat. Salah satu tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pranata Humas Ahli Utama adalah merancang efisiensi komunikasi organisasi. Meskipun demikian, Pranata Humas Ahli Utama atau Humas Pemerintah secara umum tetap merupakan insan kehumasan yang membantu tugas pemerintah di dalam mengkomunikasikan kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pemerintah pada setiap masanya.

## **Referensi**

- Courtwright, D. T. (2005). 'Carry on Smoking': Public Relations and Advertising Strategies of American and British Tobacco Companies Since 1950. *Business History*, 47 (3), 421-432.
- Gilaninia, S., Taleghani, M., & Mohammadi, M. E. (2013). The Role of Public Relations in Organization. *Arabian Journal of Business and Management Review (Nigerian Chapter)*, 1 (10), 47-51.
- Idris, I. K. (2014). Peran Humas Pemerintah di Era Keterbukaan Informasi, Analisis Isi Permenpan-RB No. 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka

- Kreditnya. *Jurnal Universitas Paramadina* , 11 (3), 1146-1163.
- Kaveria, E. (2003). The Public Relations Strategy of Alexander Herzen State Pedagogical University in St. Petersburg: The Dialogue Between The Heritage and The Present of a University. *Higher Education in Europe* , 28 (1), 455-459.
- Kuperman, J. C. (2003). Using Cognitive Schema Theory in The Development of Public Relations Strategy: Exploring The Case of Firms and Financial Analysts Following Acquisition Announcements. *Journal of Public Relations Research* , 15 (2), 117-150.
- Martinez, B. A., & Molleda, J. (2004). The Frames of Jornal do Senado: A Public Relations Developmental Strategy of The Brazilian Federal Senate. *Conference Papers--International Communication Association* , (pp. 1-28).
- Martinson, D. (1996). "Truthfulness" in Communication is Both a Reasonable and Achievable Goal for Public Relations Practitioners. *Public Relations Quaterly* , 41 (4), 42-45.
- Page, K. (2003). Responding to Activism: An Experimental Analysis of Public Relations Strategy Influence on Beliefs, Attitudes, and Behavioral Intentions. *Conference Papers--International Communication Association* , (pp. 1-38).
- Werder, K. P. (2005). An Empirical Analysis of The Influence of Perceived Attributes of Publics on Public Relations Strategy Use and Effectiveness. *Journal of Public Relations Research* , 17 (3), 217-266.
- Werder, K. P. (2006). Responding to Activism: An Experimental Analysis of Public Relations Strategy Influence on Atributes of Publics. *Journal of Public Relations Research* , 18 (4), 335-356.

# **BAB 7**

## **PENUTUP**

**Kesimpulan** dari seluruh kajian mengenai penelitian, publikasi, dan peran strategis Humas Pemerintah memperlihatkan bahwa Humas Pemerintah harus selalu memperbaharui fungsinya sebagai agen komunikasi pemerintah. Baik itu perannya di dalam membangun komunikasi organisasi, komunikasi publik, maupun komunikasi internasional. Pemerintah sendiri sangat menghargai profesi kehumasan, karena tugas dan fungsinya dapat mendukung kerja pemerintah di dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan program kegiatan pemerintah. Dalam menjalankan perannya, Humas Pemerintah tidak mungkin mengabaikan perkembangan teknologi informasi dan dinamika perkembangan perilaku sosial yang terus berubah menyesuaikan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada.

Rekomendasi pertama yang harus disikapi Humas Pemerintah di dalam membangun peran strategisnya pada skema pembangunan bangsa saat ini adalah potensi penciptaan ruang komunikasi publik dengan pendekatan budaya. Budaya dinilai menjadi faktor konektivitas sosial yang mampu mempengaruhi publik dengan baik, karena pesan yang disampaikan pemerintah mampu mendekatkan masyarakat dengan pemerintah melalui budaya yang dimiliki suatu bangsa atau komunitas masyarakat tertentu. Bahasa menjadi salah satu unsur budaya yang dapat digunakan pemerintah di dalam membangun komunikasi publik. Jika pesan yang disampaikan pemerintah bisa mengakomodir bahasa komunitas masyarakat tertentu, persyaratan ini diyakini mampu memobilisasi masyarakat pemilik bahasa tersebut. Di satu sisi, keragaman budaya Indonesia bisa menjadi salah satu keunggulan bagi bangsa ini. Bahasa daerah yang dimiliki bangsa ini sangat beragam. Keragaman bahasa daerah bangsa Indonesia inilah

yang menjadi aset kekayaan bagi bangsa ini. Aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun satu kesamaan perspektif bangsa di dalam perbedaan budaya yang ada. Sementara itu di lain sisi, pemahaman terhadap bahasa asing lainnya juga merupakan bentuk komunikasi publik yang etis di dalam memahami budaya bangsa lainnya. Dengan memahami budaya bangsa lain, Humas Pemerintah diyakini mampu meningkatkan peran strategis mereka di dalam etika pergaulan komunitas internasional.

Untuk rekomendasi kedua. Rekomendasi ini memberikan masukan bagi Humas Pemerintah di dalam menjalankan fungsi mereka sebagai edukator bagi masyarakat. Setiap informasi dan layanan yang diberikan pemerintah melalui peran Humas Pemerintah ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan pemerintah terhadap kebijakan dan program kerja pemerintah. Pemanfaatan media sosial sebagai kanal media komunikasi yang populer di kalangan generasi milenial tentu menjadi pilihan yang tepat bagi Humas Pemerintah di dalam menjalankan strategi komunikasinya. Melalui media sosial, peran Humas Pemerintah sebagai agen edukator bisa tersalurkan. Media sosial menjadi media yang tepat ketika program layanan pemerintah dapat menyatu dengan karakteristik generasi milenial yang identik dengan komunitas virtualnya. Namun ada satu persoalan yang perlu untuk diperhatikan. Yaitu kecenderungan perilaku para pengguna media sosial yang seringkali abai terhadap norma maupun etika dalam bersosialisasi di ruang virtual. Hal inilah yang menjadi alasan bagi Humas Pemerintah untuk selalu bertindak ekstra hati-hati di dalam bersikap dan bertutur kata melalui teks virtualnya. Terlepas dari kecenderungan tersebut, media sosial tetaplah menjadi salah satu kanal media alternatif yang masih bisa digunakan oleh Humas Pemerintah.

Sementara itu untuk rekomendasi ketiga, Humas Pemerintah tampaknya perlu terlibat di dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan kerja organisasi. Komunikasi organisasi menjadi bentuk komunikasi yang tepat bagi Humas Pemerintah di dalam menjaga ekosistem lingkungan organisasi kerja pemerintah. Dengan terjaganya ekosistem lingkungan kerja, kesinambungan proses kerja pegawai pemerintah bisa meningkatkan semangat produktivitas kerjanya. Mengelola sampah dari hasil residual aktivitas kegiatan sehari-hari para pegawai pemerintah menjadi salah satu contoh bagaimana pegawai bisa bersikap di dalam menjaga ekosistem lingkungan kerjanya. Oleh sebab itu, saran yang terbaik dari program kegiatan ini adalah mendorong pegawai untuk membiasakan diri hidup dalam lingkungan kerja yang sehat dan asri. Namun, peran Humas Pemerintah tentu tidak hanya sebatas memberikan anjuran saja. Perlu ada solusi lainnya. Dan saran tambahan yang dapat membuka peluang terciptanya ekosistem lingkungan kerja yang benar-benar terkoneksi dengan alam disekitarnya adalah dengan mengembangkan aplikasi sistem kerja yang memang ditujukan untuk membangun budaya kerja organisasi yang sehat. Sehat dalam arti membangun kenyamanan lingkungan kerja dan lingkungan alam, serta membiasakan diri bagi setiap pegawai untuk peduli terhadap kesehatan diri mereka masing-masing.

Sebagai rekomendasi terakhir, rekomendasi keempat, Humas Pemerintah tetap berupaya berperan sebagai agen komunikasi bagi kebijakan pemerintah. Namun demikian, pemerintah perlu memberikan apresiasi kepada tenaga kehumasan pemerintah dengan meningkatkan jenjang jabatan kehumasan. Sebuah langkah yang tepat untuk mendukung pembaharuan kompetensi Humas Pemerintah di dalam membangun kredibilitas komunikasi pemerintah. Kompetensi

bagi Humas Pemerintah perlu untuk diperbaharui agar Humas Pemerintah dapat membangun kreativitas komunikasinya di dalam menjawab perkembangan isu yang terjadi. Baik itu isu yang ada di dalam lingkungan kerja organisasinya maupun isu publik yang menyangkut perkembangan kehidupan masyarakat luas.

Semua rekomendasi di atas merupakan hasil dari kajian di bidang kehumasan yang tujuannya untuk mengembangkan potensi hasil kerja Humas Pemerintah yang jauh lebih baik dari hasil sebelumnya. Humas Pemerintah diharapkan bisa menghasilkan karya cipta yang baru agar model komunikasi yang dikembangkan semakin variatif dan lebih baik lagi. Pemerintah membutuhkan tenaga kehumasan yang saling mengisi dengan profesi lainnya di lingkungan pemerintahan. Dengan begitu, tujuan untuk membangun kemajuan bangsa ini dapat tercapai. Dan yang paling utama adalah membangun kemajuan sumber daya manusia Indonesia itu sendiri. Semoga kajian ini dapat memberikan masukan sebagai sarana edukasi bagi Humas Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.

## **Autobiografi**

Penulis merupakan tenaga fungsional di bidang kehumasan di lingkungan pemerintah. Latar belakang pendidikan penulis memang tidak memiliki korelasi langsung dengan bidang kehumasan yang ditekuninya sejak tahun 2007 yang lalu. Namun, latar belakang pendidikan yang berbeda tentunya bisa memberikan nuansa dan sudut pandang yang berbeda di dalam membangun pola komunikasi dan kehumasan, khususnya pola komunikasi dan kehumasan di lingkungan pemerintah.

Penulis berharap buku ini bisa memberikan banyak manfaat dan kontribusi keilmuan di bidang komunikasi dan kehumasan. Cakupan konten buku ini yang melihat perspektif luas dari konteks area internasional juga bisa menjadi salah satu acuan baru di dalam melihat peran Humas di lingkungan pemerintah. Sebagai informasi saja, pendidikan paska sarjana yang ditempuh penulis diperoleh di beberapa universitas, seperti Universitas Budi Luhur, Universitas Indonesia, dan Universitas Nasional Pukyong. Sebagai penutup, penulis ingin mendedikasikan buku ini untuk tambahan referensi pada ilmu komunikasi dan kehumasan secara umum dan sektor pemerintahan secara khusus.